



# Buletin Parlamentaria

Nomor 1001/I/IV/2018 • April 2018



INTER PARLIAMENTARY UNION, JENEWA SWISS

**KETUA DPR:**

## Migrasi Pengungsi Masalah Serius



Dua Hakim Industrial Resmi Terpilih



# Ketua DPR: Migrasi Pengungsi Masalah Serius



Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota DPR dalam sidang IPU di Jenewa, Swiss

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku prihatin dengan permasalahan migrasi dan pengungsi yang masih menjadi persoalan serius negara-negara di dunia, karena masih banyak negara yang belum mampu menyelesaikan masalah tersebut.**

Hal itu disampaikan Bamsuet, sapaan akrabnya, saat menyampaikan pidato dalam sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Minggu (25/3). Sidang IPU ke-138 tersebut dipimpin langsung oleh Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron, serta Sekretaris Jenderal IPU Martin Chunggong. Dihadiri pula oleh 69 ketua parlemen se-dunia dan 1.539 anggota delegasi dari 146 negara.

“Sudah puluhan tahun migrasi terjadi dalam skala besar, terutama disebabkan oleh konflik bersenjata dan kekerasan yang masih terus dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Masalah tersebut harus mendapat perhatian serius bagi parlemen anggota IPU untuk bersama mencarikan jalan keluar terbaik,” jelas Bamsuet.

Bamsuet menjelaskan bahwa DPR RI sangat menjunjung tinggi pentingnya Konvensi Internasional tentang

Perlindungan Buruh Migran. Konvensi ini telah diadopsi melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yang bertujuan untuk memperkuat penempatan dan perlindungan pekerja migran, serta menyediakan landasan hukum yang lebih kuat bagi institusi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Di samping itu, Indonesia menerapkan pendekatan ‘triple win’ dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait migrasi. Pendekatan tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan negara pengirim, tetapi juga negara penerima dan migran,” kata Bamsuet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memaparkan, Indonesia memang bukan bagian dari negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Namun, atas dasar pertimbangan kemanusiaan,

Pemerintah Indonesia telah menampung sebanyak 14.000 pengungsi dan pencari suaka.

“Hal ini mencerminkan komitmen dan kepedulian Indonesia terhadap isu migrasi dan pengungsi. Sebagai negara transit, kami juga bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization of Migration (IOM) dalam hal penyediaan fasilitas penampungan bagi pengungsi yang sedang menunggu proses pemulangan atau penempatan kembali di negara ketiga,” tutur Bamsuet.

Di kancah internasional, lanjut Bamsuet, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap permasalahan pengungsi, khususnya terkait isu Rohingya di Myanmar. Kekerasan terhadap etnis Rohingya dalam segala bentuk dan manifestasinya, merupakan ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian global.



Foto: Dok.BKSAP/hr

dengan kebutuhan di lapangan, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

“Kami menyadari bahwa mewujudkan hak asasi manusia bagi semua migran merupakan tanggung jawab yang timbul dari kewajiban internasional kita. Karena itulah, kita harus mendukung Global Compact for Migration dan Global Compact for Refugees, yang saat ini telah memasuki putaran kedua pembahasan,” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini optimis Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR) mampu menyelesaikan isu-isu pengungsi dan migrasi. Tak hanya itu, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat pula mendorong tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga, setiap individu dapat memetik manfaat dari agenda pembangunan global dan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

“Kami percaya bahwa IPU memiliki kapasitas yang memadai dalam mendorong lahirnya instrumen internasional seperti GCM dan GCR yang dapat lebih mengakomodir kepentingan negara pengirim, negara penerima dan juga migran secara proporsional, serta seimbang. Kami juga berharap agar Sidang-Sidang IPU tidak hanya menghasilkan resolusi, tetapi memberi dampak langsung pada perdamiaan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah tugas utama kita sebagai wakil rakyat. Bukan hanya resolusi yang kita butuhkan, tetapi evaluasi dan kerja nyata,” ujar Bamsoet.

Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyampaikan undangan kepada seluruh anggota delegasi IPU untuk menghadiri Forum Parlemen Sedunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang ke-2 (The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Energies For All), yang akan diselenggarakan di Bali pada 12-13 September 2018 mendatang.

“Forum ini merupakan satu-satunya forum antar parlemen yang mengangkat tentang isu pembangunan berkelanjutan secara spesifik,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah itu.

Untuk diketahui, menurut Laporan Migrasi Internasional tahun 2017, setidaknya terdapat 258 juta migran di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat dari tahun 2000 sebanyak 173 juta migran.

■ ila/sf

Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia tampil sebagai pionir dalam melakukan langkah-langkah diplomasi yang dibutuhkan untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dan transparansi dalam penanganan pengungsi Rohingya. Lembaga bantuan Indonesia juga membangun fasilitas kesehatan, pendidikan dan penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya.

“Ini merupakan realisasi konkret dari kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada awal 2018 dan Pimpinan DPR RI pada akhir 2017 ke Cox’s Bazaar. Selain Rohingya, Indonesia juga sangat prihatin dengan konflik-konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti di Palestina, Suriah, dan Afghanistan,” tegas Bamsoet.

Bamsoet juga mengajak parlemen anggota IPU untuk membangun komunikasi intensif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi migran reguler dan ireguler. Salah satunya melalui perumusan kebijakan nasional yang komprehensif dan sesuai



**PENGAWAS UMUM**

Pimpinan DPR RI

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

**SEKRETARIS REDAKSI**

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

**ANGGOTA REDAKSI**

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,

Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,

Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega,

Ila Rachmayati, Mahir Pratama, Taufan Syahrulli

**REDAKTUR FOTO**

Eka Hindra, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief

Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

**ADMINISTRASI**

Bagus Mudjiharjanto, Luthfi Suci Nur 'Aini,

Damar Maulana Taher

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**PHOTOGRAFER ART**

Friederick Munchen

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito

**STAF PRODUKSI**

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Mustaqim, S.Kom.I

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**

Sjaefudin, S.Sos

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Anif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# SKPT Harus Tingkatkan Ekonomi Masyarakat MTB

Komisi IV DPR RI berharap agar Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Program yang dicanangkan pemerintah pada 2015 itu diharapkan juga dapat mendorong percepatan peningkatan ekspor perikanan Indonesia.



Tim Kunker Komisi IV DPR RI didampingi KKP menyalurkan bantuan kepada nelayan dan koperasi di Saumlaki, MTB, Maluku

“Komisi IV telah menyetujui anggaran pada 12 SKPT di seluruh Indonesia. Diharapkan SKPT di MTB ini sebagai contoh, karena MTB berbatasan langsung dengan Australia dan harus optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat MTB,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat menemui para nelayan, pengusaha, dan seluruh pihak yang terkait dengan perikanan se-Kabupaten MTB, di Saumlaki, Selasa (27/3).

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja ini pihaknya menyerap banyak masukan, salah satunya mengenai jarak tempuh pendistribusian. Selain menerima masukan, Komisi IV juga menyalurkan bantuan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk kelompok nelayan dan koperasi, diantaranya kapal berbobot 10 GT dan 3 GT, termasuk alat tangkapnya.

Dalam kesempatan yang sama,

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menyorot sisi lain Kabupaten MTB yang letaknya berdekatan dengan lokasi pengembangan gas abadi, Blok Masela. Menurutnya, untuk pengoperasian Blok Masela ke depan, membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung yang salah satunya adalah pengembangan SKPT Saumlaki ini. Blok Masela akan bersentuhan dengan lokasi SKPT MTB.

“Program ini sangat penting. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI hadir di MTB ini untuk membahas pula soal anggaran yang cukup signifikan. Untuk 1 SKPT ini mencapai Rp100 miliar untuk memfasilitasi program-program yang ada. Dan program ini baru dianggarkan 2016, tapi itu tidak sekaligus dalam tahun yang ada, tetapi bertahap. Diharapkan tahun 2019, SKPT yang ada di Kabupaten MTB sudah dapat fungsional penggunaannya,” kata politisi F-Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zulfichar Mochtar mengutarakan, SKPT ini tujuannya untuk membangun bisnis pertumbuhan perikanan baru yang strategis. Menurutnya, MTB ini sangat potensial untuk menjadi hub, karena sangat berdekatan dengan Australia dan Darwin. Sehingga potensi ekspor bisa dikembangkan di sini, termasuk nantinya memberikan dampak positif bagi MTB sendiri.

Diketahui, Saumlaki mempunyai potensi alam laut yang melimpah. Pelabuhan di Saumlaki juga sering disandari oleh kapal-kapal dari Australia. Terutama pada kegiatan Sail Darwin-Saumlaki yang diadakan setiap setahun sekali. Biasanya para peserta acara tersebut turun dan menyinggahi pantai dan desa-desa di sekitar Saumlaki. Salah satu desa yang menjadi tujuan adalah desa Tumbur. Desa ini terkenal dengan kerajinan patung kayunya. ■ soe/sf

# Taufik Kurniawan Lantik Pimpinan Komisi VI dan Komisi VIII DPR

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Taufik Kurniawan resmi melantik Anggota DPR RI Dito Ganinduto sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menggantikan rekan sejawatnya dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Peresmian itu didahului dengan meminta persetujuan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI lainnya.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan melantik Pimpinan Komisi VI DPR RI (kanan) dan Pimpinan Komisi VIII DPR RI (kiri)

Foto: Arief/hr

**T**aufik menjelaskan, penggantian Wakil Ketua Komisi VIII berdasarkan surat keputusan dari Partai Golkar Nomor SC 001916/DPR RI tanggal 22 Maret 2018 tentang penggantian pimpinan Alat Kelengkapan Anggota Dewan.

“Semoga Dito Ganinduto dapat menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan maupun tata tertib yang ada,” ucap Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3).

Pengesahan acara pelantikan Pimpinan Komisi VI yang baru tersebut ditandai dengan penyerahan palu Pimpinan Sidang secara simbolis kepada Dito Ganinduto. Dalam kesempatan tersebut, Dito memohon kerjasama dan dukungan dari seluruh Anggota Komisi VI DPR, agar apa yang menjadi harapan Komisi VI DPR dapat tercapai.

“Dengan soliditas dan kerjasama kita, tentu kita dapat mencapai apa yang kita harapkan bersama. Saya akan meneruskan kinerja yang selama ini telah dilakukan oleh Komisi VI,” ujarnya.

Dito juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rekannya Bowo Sidik Pangarso, atas kerja kerasnya selama ini mewakili Fraksi Partai Golkar dalam memimpin Komisi VI. “Apa yang telah dikerjakan oleh Pimpinan sebelumnya akan tetap kita tindaklanjuti untuk kepentingan kita bersama,” tandasnya.

Dalam hari yang sama, Taufik juga melantik Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) Tubagus Ace Hasan Syadzily dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi VIII menggantikan Noor Achmad.

“Jadi, apakah pergantian Pimpinan Komisi VIII ini dapat disetujui?” tanya Taufik kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang hadir. Jawaban ‘setuju’ pun diucapkan serentak.

Setelah disetujui, Ace pun menyampaikan sambutannya. Ia berharap, agar keberadaannya dapat menambah kinerja Komisi VIII menjadi jauh lebih baik dan tetap menjaga kekompakan dari Komisi Agama itu.

“Semua ini merupakan amanah yang diberikan partai kepada saya untuk dijalankan sebaik-baiknya serta

penggantian pimpinan di internal Partai Golkar merupakan tugas partai dan saya juga harus banyak belajar dari para pimpinan senior di Komisi VIII,” kata Ace.

■ as,tn/sf

**Semua ini merupakan amanah yang diberikan partai kepada saya untuk dijalankan sebaik-baiknya serta penggantian pimpinan di internal Partai Golkar merupakan tugas partai dan saya juga harus banyak belajar dari para pimpinan senior di Komisi VIII**



Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Belarusia Adang Sudrajat bersama Duta Besar Belarusia

Foto: Oj/ht

# Indonesia - Belarusia Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan dan Ekonomi

**Indonesia dan Belarusia memiliki banyak sektor yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan dua negara. Hal ini pun yang tengah diperkuat oleh Indonesia dan Belarusia.**

**D**emikian diungkapkan Ketua Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR – Parlemen Belarusia Adang Sudrajat saat menerima Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Valery Kolesnik, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Dijelaskan politisi F-PKS itu, GKSB baru terbentuk periode ini. Untuk itu, pihaknya ingin mempererat hubungan dengan Belarusia di bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan budaya.

“Kami ingin mempererat diplomatik yang menguntungkan kedua negara, dengan memanfaatkan potensi masing-masing. Untuk itu, perlu dialog politik antara Indonesia dan Belarusia guna meningkatkan kerja sama dibidang perdagangan dan ekonomi,” jelasnya.

Politisi dapil Jawa Barat itu juga mengharapkan adanya hubungan *people to people* (antar bangsa) dan *business to business* (antar bidang usaha) yang sangat erat antar kedua negara.

Dalam kesempatan yang sama,

**“Kami ingin mempererat diplomatik yang menguntungkan kedua negara, dengan memanfaatkan potensi masing-masing. Untuk itu, perlu dialog politik antara Indonesia dan Belarusia guna meningkatkan kerja sama dibidang perdagangan dan ekonomi,”**

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mulyadi mengatakan, Indonesia akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai alternatif persiapan pengganti batubara, minyak dan gas.

“Belarusia punya teknologi yang bisa dipelajari dan menjadi acuan dalam penerapan nuklir, ini sangat menarik karena sebelumnya Rusia juga menawarkan. Untuk itu, kami akan mengunjungi Belarusia untuk memutuskan bekerja sama dengan siapa. Selain itu, alutsista juga akan menjadi objek kunjungan,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Valery Kolesnik mengatakan Belarusia dan Indonesia sudah menjalin hubungan di bidang perdagangan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya.

“Dalam pertemuan tadi, saya menawarkan nilai-nilai tambah untuk hubungan kedua negara khusus dibidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini dikarenakan di Indonesia memiliki banyak perusahaan dan memiliki kekayaan alam yang sangat potensial,” jelasnya usai pertemuan.

Selain itu, Dubes Belarusia juga menyampaikan informasi bagaimana cara memanfaatkan pembangkit nuklir agar tidak berbahaya dan bisa untuk tujuan damai. Terakhir, pihaknya juga menyampaikan banyak turis Belarusia yang mengunjungi Bali, diharapkan turis Indonesia juga berkunjung ke Belarusia.

“Bali memang menjadi tempat kunjungan para turis, karena suasana alam yang berbeda dengan Belarusia. Tapi kami sampaikan juga bahwa tidak hanya Bali pulau indah di Indonesia. Ada ribuan pulau indah lainnya,” ungkapnya. ■ rmm/sf

# MKD Terima Kunjungan Komite Etik Parlemen Filipina

**Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI TB. Soenmandjaja mengapresiasi kunjungan Komite Etik dan Previlage Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) Republik Filipina. Hal tersebut terungkap saat menerima delegasi Parlemen Filipina di ruang rapat MKD, Senayan, Jakarta, Jumat (23/3).**

“ Kami mengapresiasi kunjungan Dewan Kehormatan Parlemen Filipina yang ingin mempelajari tentang tugas, fungsi dan wewenang serta kerja dari MKD. Bagi kami ini juga merupakan kesempatan kami juga untuk belajar kode etik yang berlaku di Parlemen Filipina. Sehingga dalam kesempatan ini kita bisa saling bertukar informasi dan belajar tentang penerapan kode etik di negara masing-masing, selain juga mempererat tali silaturahmi,” ungkap Soenmandjaja.

Pada kesempatan itu politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, bahwa DPR RI telah menyusun dan menerapkan kode etik sebagai pedoman bagi seluruh Anggota DPR RI untuk bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap bagi setiap Anggota DPR RI. Sehingga seluruh Anggota DPR RI berkewajiban mentaati kode etik dan bagi yang tidak mentaatinya akan diberikan sanksi.

Ketentuan itu, lanjut Soenman telah diatur dalam beberapa peraturan. Diantaranya 16 prinsip atau norma, yakni kepentingan umum, integritas, hubungan dengan mitra kerja, akuntabilitas,

keterbukaan dan konflik kepentingan, rahasia dan kedisiplinan, hubungan dengan konstituen atau masyarakat, perjalanan dinas, independensi, pekerjaan lain di luar dinas, hubungan dengan wartawan, hubungan dengan tamu di lingkungan DPR, hubungan anggota dengan kelengkapan DPR, etika persidangan, hubungan dengan sekretaris, hubungan dengan tenaga ahli dan staf administrasi, hubungan dengan Sekjen DPR.

“Kode etik ini merupakan sebuah pedoman kriteria-kriteria dalam etika politik, yang misalkan perlu adanya instrumen dan indikator akuntabilitas demokratis, yang mana anggota masyarakat bisa menuntut tanggung jawab anggota DPR yang mewakili mereka. Dan MKD merupakan salah satu jalur untuk menuntut tanggung jawab anggota DPR. MKD sebagai satu-satunya instrumen etika politik yang dapat menanggalkan hak imunitas anggota DPR,” paparnya.

Ditambahkan Anggota MKD Ahmad Zacky Siradj bahwa saat ini masyarakat dunia tengah mengalami masalah etika

global, *social distrust*, dan pergeseran nilai-nilai etika yang sedang terjadi di berbagai negara. Untuk itu agaknya penting bagi DPR dan Parlemen Filipina untuk menjalin kerja sama, memperkuat etika dan moralitas baik di Indonesia maupun Filipina.

Ke depan diharapkan Indonesia dan Filipina dapat menjalin kerja sama menjaga fungsi dan peran lembaga etik di parlemen masing-masing. Sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja anggota DPR RI dan alat kelengkapan dewan lain dalam melaksanakan fungsi kedewanan yakni pengawasan, legislasikan dan fungsi anggaran.

Sementara itu Ketua Delegasi Komite Etik Parlemen Filipina Delphin Gan Lee mengucapkan rasa terimakasihnya atas sambutan yang diberikan oleh MKD DPR RI. Selain itu ia menilai banyak hal yang dapat ia pelajari dari sistem perpolitikan yang ada di Indonesia. Khususnya terkait dengan penerapan kode etik terhadap anggota parlemennya.

Pasalnya, tambah Delphin, negaranya ke depan juga berencana akan mengamandemen konstitusi negaranya. Sekaligus rencana merubah sistem pemerintahan Filipina dari *unilateral* atau *bicameral* (dua kamar) menjadi sistem kepresidenan federal dan sistem parlemen federal. ■ *ayu/sc*



**DPR RI telah menyusun dan menerapkan kode etik sebagai pedoman bagi seluruh anggota DPR RI untuk bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap bagi setiap anggota DPR RI. Sehingga seluruh anggota DPR RI berkewajiban mentaati kode etik dan bagi yang tidak mentaatinya akan diberikan sanksi**

Wakil Ketua MKD DPR RI TB. Soenmandjaja menerima kunjungan Komite Etik dan Previlage Parlemen Republik Filipina

Hal tersebut disampaikan saat membacakan pandangan mini Fraksi terhadap Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI, Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).

“Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memang tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan negara lain dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya,” ujarnya.

Menurut politisi F-PDI Perjuangan itu, hubungan atau keterkaitan dengan negara lain dapat dilakukan dalam bentuk diantaranya melalui perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

“Dalam hal ini, perlunya pengesahan dalam bentuk Undang-Undang terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, berpedoman kepada ketentuan pasal 10 huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menegaskan atas pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara,” ucapnya.

Evita menjelaskan, kerja sama antara Indonesia dan Thailand diwujudkan dalam bentuk persetujuan dalam bidang pertahanan yang telah ditandatangani antara kedua negara pada tanggal 21 Mei 2015 lalu di Jakarta, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

“Ada 4 prinsip penting yang saya tarik dari persetujuan antara Indonesia dengan Thailand ini, diantaranya adalah persetujuan dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama di bidang pertahanan

## Komisi I Dukung Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Thailand

**Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty sepakat bahwa kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan negara lain, termasuk Thailand, merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia.**



Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menandatangani draf RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Foto: Anef/od

dalam semangat ASEAN, saling percaya dan pengertian, dan persetujuan ini berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan Undang-Undang yang berlaku di kedua negara,” tuturnya.

Selain itu, Evita juga menambahkan bahwa prinsip penting lainnya yaitu kedua pihak menyadari kepentingan bersama dalam mempromosikan hubungan baik dalam persahabatan dan kerja sama timbal balik dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran antara masyarakat kedua negara, serta penguatan kerja sama pertahanan akan berkontribusi pada hubungan yang saling

menguntungkan bagi pertahanan nasional kedua negara.

Politisi dapil Jateng ini juga mengingatkan bahwa dalam membuat perjanjian atau persetujuan dengan negara lain, Indonesia harus menekankan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi perhatian utama dari pemerintah, maupun semua pihak terkait.

“Sebab saya menganggap bahwa pengesahan terhadap persetujuan ini perlu segera dilakukan, sehingga dapat bermanfaat secara maksimal demi kepentingan pertahanan Indonesia,” tutupnya. ■ ila/sf

## Penataan Dapil Harus Sejalan Dengan Semangat UU Pemilu

**Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, penataan daerah pemilihan (dapil) Anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilihan umum tahun 2019 harus sejalan dengan semangat perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.**



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria

Foto: Arief

“Penataan dapil harus sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat 7 prinsip penataan dapil. Yang terpenting adalah penyederhanaan ini salah satunya kan meringankan biaya pemilu,” kata Riza di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, penataan dapil itu bukan untuk menyempitkan dapil terlalu kecil, karena akan memangkas representasi dan profesionalisme. Namun jika terlalu lebar juga memiliki masalah dengan biaya politik yang tinggi.

“Penataan dapil ini memang sangat penting, makanya perlu dirumuskan hal yang prinsip di dalam terbentuknya dapil ditingkat kabupaten/kota,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman yang mengungkapkan penataan dapil ini, memang diserahkan kepada KPU berdasarkan data dari KPU di kabupaten/kota dan telah dilakukan uji publik.

“Nah saat ini mereka mengkonsultasikan kepada DPR terkait

penambahan dapil. Kita menanyakan kriteria apa yang digunakan dalam penambahan dapil, ini sudah bagus tapi kita ingin mengetahui alasannya,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Sekedar informasi, tujuh prinsip penataan dapil yang dimaksud dan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas penduduk, dan kesinambungan.

Untuk itu, berdasarkan prinsip kesinambungan, maka dapil yang sudah terbentuk pada tahun 2014 lalu dapat dipertahankan komposisinya. Kecuali dapil tersebut sudah tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil, atau terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan, adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya alokasi kursi dapil menjadi lebih dari 12 atau kurang dari 3 dan atau sebab atau alasan lain dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. ■ rmm/sf

## Perlu Pengamatan Merata Sebelum Ubah Peraturan

**Anggota Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen) Komisi X DPR RI Bambang Sutrisno mengatakan, untuk merubah suatu peraturan, diperlukan pengamatan persoalan secara merata dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, agar ketika peraturan tersebut diterapkan, tidak akan mengalami kendala yang berarti di lapangan.**

Hal itu dikatakan Bambang saat RDPU Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR dengan Kadin Pendidikan dan Kebudayaan dari Provinsi Jawa Barat, Bali, Grobogan, Malang, Kota Tegal, serta Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dari Provinsi Aceh, Banten, Gorontalo, Sulbar, dan Jawa Tengah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

“Tidak mudah itu untuk mengubah peraturan, kita harus terlebih dahulu melihat secara merata semua persoalan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Seperti masalah pengalihan kewenangan untuk pendidikan SMA dan SMK dari



Anggota Komisi X DPR, Bambang Sutrisno

Foto: Oj/ahr

kabupaten kota ke provinsi yang masih menimbulkan banyak persoalan di daerah, terutama yang berada di luar Pulau Jawa,” ucap Bambang.

Bambang mengatakan, pada umumnya persoalan yang disampaikan oleh para narasumber dalam RDPU Panja SN Dikdasmen Komisi X adalah masalah sarana prasarana, masalah penilaian terhadap hasil pendidikan yang belum mencapai target, dan kekurangan tenaga pendidik dan guru.

“Ini merupakan kelanjutan dari rapat-rapat Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR sebelumnya, karena kami harus mencari contoh-contoh dari beberapa daerah secara merata. Kita juga mengecek secara acak tentang pendapat mengenai kondisi sekolah, kondisi sarpras, kondisi pendidikan kita, tentang hambatan-hambatan yang ada di dalam dunia pendidikan kita,” terang Bambang.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pihaknya ingin mengetahui apakah sistem pendidikan nasional Indonesia sudah bisa dijalankan atau masih harus dikoreksi. Ia berharap, dalam beberapa pertemuan lagi, panja ini bisa segera menyelesaikan tugasnya dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. ■ dep/sf

# Presiden Seharusnya Segera Keluarkan Perpres Dewan Insinyur



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

Foto: Eno/hr

**Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menuturkan, untuk memenuhi ketersediaan insinyur profesional, Presiden seharusnya segera mengeluarkan Perpres Pembentukan Dewan Insinyur Indonesia (DII). Hal itu sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, Perpres ini seharusnya sudah terbitkan pemerintah pada tahun 2015 lalu.**

sangat besar seiring dengan peningkatan anggaran infrastruktur. Kalau dibiarkan terus, sama saja membuka keran untuk tenaga insinyur asing masuk ke Indonesia,” kata Sigit.

Sigit juga mengingatkan pemerintah bahwa belum diterbitkannya Perpres pembentukan DII merupakan bentuk pengabaian terhadap UU Keinsinyuran. Sesuai dengan Pasal 55 UU Keinsinyuran, DII harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

“Pembentukan DII adalah amanat UU dan harus dijalankan suka atau tidak suka. Jika tidak dilaksanakan berarti mengabaikan amanat UU. Karena itu, presiden seharusnya sudah mengeluarkan Perpres ini jika tidak ingin dinilai mengabaikan UU,” tutur Politisi PKS ini.

Seperti diketahui, meski sudah memiliki UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, namun hingga kini masih banyak aturan turunan UU tersebut yang belum diterbitkan. Ketiadaan peraturan turunan tersebut memberikan implikasi serius terhadap serbuan tenaga kerja asing dan sertifikasi serta izin kerja insinyur.

UU Keinsinyuran ini, kata Sigit, merupakan instrumen penting dan strategis untuk mengejar berbagai ketertinggalan Indonesia di sisi keinsinyuran dibandingkan beberapa negara, baik di ASEAN maupun dunia.

Sebagai contoh, posisi Indonesia dari sisi jumlah sarjana teknik per satu juta penduduk relatif rendah dibanding negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan (25.309 Sarjana Teknik), Vietnam (9.037), Republik Rakyat Tiongkok (5.739), Thailand (4.121), Malaysia (3.333) dan Indonesia (3.076). ■ hs/sf

“ Saat ini kita sangat kekurangan tenaga insinyur profesional. Padahal pembangunan infrastruktur kita digenjot. Ini berbahaya. Bagaimana proyek-proyek strategis nasional bisa selesai jika SDM-nya tidak ada,” kata Sigit dalam rilis yang diterima Parleментарia, Selasa (27/3).

Sesuai dengan UU Keinsinyuran, kata Sigit, seharusnya Dewan Insinyur Indonesia (DII) telah dibentuk dalam waktu paling lambat satu tahun setelah UU itu diundangkan, yang berarti tahun 2015. Kenyataannya, hingga kini DII belum dibentuk. Hal ini membuat beberapa fungsi DII yang diamanatkan oleh UU

Keinsinyuran tidak berjalan.

Beberapa tugas penting DII adalah menetapkan standar kompetensi insinyur bersama menteri, menetapkan Sistem Registrasi Insinyur, menetapkan Sistem Sertifikasi Insinyur, menetapkan Sistem Uji Kompetensi, menetapkan Sistem Pengawasan Alih IPTEK Insinyur Asing dan Sistem Pengawasan Praktik Keinsinyuran.

“DII memiliki tugas merumuskan kebijakan, menjalin kerjasama keinsinyuran internasional dan mengawasi alih teknologi oleh insinyur asing. Ketiadaan DII menghambat pencetakan insinyur profesional. Padahal, kebutuhan kita akan tenaga insinyur

## PT. PIM Tidak Beroperasi Normal

**Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) tidak dapat beroperasi dengan kapasitas normalnya. Diketahui, dari dua pabrik yang dimiliki, hanya satu pabrik yang beroperasi optimal saat ini.**

“ Pabrik ini sangat penting bagi pertanian. Untuk itu, pertemuan ini adalah urun rembuk semua mitra kerja untuk membantu penyelesaian terbatasnya pasokan gas termasuk fluktuasi harga gas yang tinggi untuk mensuplai kebutuhan PT. PIM,” kata Gus, saat membuka pertemuan dengan Direksi PT. PIM dan sejumlah mitra kerja, di Banda Aceh,

Selasa, (27/3).

Hadir dalam pertemuan ini diantaranya Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Pertamina (Persero), PT PGN (Persero), PT Pertamina Hulu Energy NSB dan NSO, PT. Pertamina Gas, PT Perta Arun Gas, Dirut PT PLN (Persero), Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Bupati Aceh Utara, BP Migas Aceh, dan

Dinas ESDM Prov. Aceh beserta jajarannya.

“Kami mendorong Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2016 tentang harga gas bumi untuk industri tertentu agar diperhatikan kembali, berkaitan keberpihakan kita pada industri pupuk nasional,” kata politisi F-Gerindra itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, PT. PIM mempunyai

# Komisi IX Tegaskan BPOM Tarik Obat yang Mengandung Babi

**Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meminta agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menarik sejumlah obat yang diduga mengandung enzim babi atau tidak halal dari pasaran. Dia memberikan waktu satu bulan, agar BPOM bisa mengatasi masalah ini. Senada dengan Dede, sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI pun meminta BPOM menarik obat dengan kandungan zat yang berasal dari babi.**

Produknya juga mengandung pancreatin. Dari 13 produk, satu katanya tidak terbukti, empat mengembalikan izin edar dan tarik produk. Nah yang 13 ini kasusnya apa, harus dijelaskan. Jangan diam-diam saja. Jangan-jangan kasusnya sama,” kata Ali.

“Kami memberikan tenggat waktu satu bulan, agar BPOM menarik obat yang mengandung enzim babi secara massal,” ujar Dede dalam keterangan persnya kepada Parlemen, Selasa (27/3).

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, hingga saat ini Komisi IX masih menerima keluhan dari masyarakat mengenai beredarnya produk obat yang mengandung babi di pasaran.

“Kami menerima keluhan dari masyarakat bahwa di antara 13 produk enzim, masih ada yang dijual secara daring (online) atau online. Ini harus ditarik dari pasaran, baik sifatnya penjualan luar jaringan ataupun daring,” ungkap Dede.

Dia menjelaskan produk obat maupun suplemen tergolong produk farmasi yang sensitif, apalagi telah terjadi kasus kontaminasi kandungan babi.

“Masalahnya kan mengandung babi. Memang benar, banyak obat mengandung babi, tetapi khusus Indonesia negara yang mayoritas muslim perlu diberikan kata-kata mengandung babi. Biasanya ada kode tertentu, sehingga masyarakat bisa menentukan sendiri dia mau

menggunakan produk itu atau tidak,” tegas Dede.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali (Fraksi PAN) juga menilai BPOM kurang transparan dalam menyikapi kasus produk enzim yang tercemar DNA babi.

“Selama ini yang ramai kan dua produsen, nyatanya ada 15 produsen.



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi.

**Kami menerima keluhan dari masyarakat bahwa di antara 13 produk enzim, masih ada yang dijual secara daring (online) atau online.**

Menurutnya, BPOM harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, apalagi negara ini konsumennya mayoritas muslim. Pihaknya mendesak BPOM untuk memperketat pengawasan di lapangan dari hulu. Apalagi diketahui Indonesia masih sebagian besar mengandalkan bahan baku farmasi dari luar negeri.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea (Fraksi PDI Perjuangan) juga mempertanyakan 13 produk enzim yang masih diperdagangkan secara online. “Kami minta untuk yang masih memproduksi, itu harus dihentikan dan tidak boleh diteruskan. Tidak boleh dibiarkan, semua harus ditindak. BPOM tidak boleh tebang pilih, nanti kesannya ada sesuatu,” kata Marinus. ■ eko/sf



Suasana pertemuan Kunjungan Komisi VII DPR dengan PT PIM dan mitra kerja di Aceh

peran penting meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam proses menunjang kedaulatan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, ia mendorong Komisi VII harus terus menjaga keberlangsungan hidup PT. PIM.

“Sebenarnya kita ada *domestic market obligation* yang 25 persennya dari produksi rata-rata setiap sumur gas yang beroperasi di Indonesia. Ya, kalau dilihat dari keseluruhan produksi gas nasional semua kan surplus, ini kan sebenarnya bisa dibagi rata ke seluruh BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak, begitupun PT. PIM,”

imbuh Herman.

Herman menambahkan, PT. PIM memegang peranan penting bagi rakyat Aceh. Menurutnya, dengan ketersediaan dan kesesuaian harga gas bumi dalam hitungan keekonomisan dapat kembali membantu produksi pabrik pupuk urea yang berdampak pada peningkatan suplai pupuk di Sumatera, kebutuhan tenaga kerja, dan kondusifnya iklim investasi, karena PT. PIM adalah lokomotif pertumbuhan perekonomian Aceh melalui sektor industri di cluster NPK serta Petrokimia.

“Karena itu perlu ada kebijakan dan keputusan politik yang berpihak pada hajat hidup masyarakat banyak,” tandas politisi Partai Demokrat itu. ■ gd/sf

## Komisi IV Tinjau Pelaksanaan HKm NTB



Tim Kunker Komisi V DPR RI berdialog dengan Plt. Bupati Lombok Tengah dan tokoh masyarakat

**Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemerintah menargetkan pada tahun 2018-2019, penyerahan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada masyarakat mencapai 12,7 juta hektar. Namun hingga kini, target itu baru tercapai 1,5 juta hektar.**

Untuk mengetahui hal ini, Komisi IV DPR RI meninjau lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gapoktan Rimba Lestari di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (27/3).

“Program ini merupakan bagian dari Program Reformasi Agraria. Kami datang untuk mengetahui kondisi HKm di lapangan, termasuk kendala minimnya capaian itu,” kata Viva, saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IV DPR RI dengan Plt. Bupati Lombok Tengah beserta jajaran dan sejumlah tokoh masyarakat.

Sementara itu, Plt. Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri mengatakan, Lalu Pathul juga menjelaskan, wilayah Kecamatan di Lombok tengah yang memiliki kawasan hutan diantaranya, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, dan Kecamatan Praya Barat Daya.

“Kecamatan-kecamatan yang memiliki kawasan hutan, masyarakatnya beraktifitas sebagai petani, berladang dan berkebun. Hasilnya juga bisa untuk mensejahterakan keluarga, termasuk mampu memenuhi biaya pendidikan, dan kesehatan. Dulunya, masyarakat dikawasan hutan membawa hasil hutan dengan cara



Belom ada

dipikul, sekarang menggunakan sepeda motor bahkan roda empat. Ini berkat hasil hutan yang melimpah,” jelasnya kepada Komisi IV DPR RI.

Diketahui, HKm di Lombok Tengah sudah memiliki Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja seluas 2.179,50 ha, yang salah satunya di Desa Aik Berik. Luasan areal hutan kemasyarakatan di NTB, akan terus bertambah karena masih ada Penetapan Areal Kerja hutan kemasyarakatan yang kemungkinan akan dikeluarkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ■ man/sf



Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa

foto: kresno/hr

## Dua Hakim Industrial Resmi Terpilih

**Dua hakim *ad hoc* industrial yang akan ditempatkan di Mahkamah Agung (MA) sudah resmi terpilih. Keduanya adalah Sugeng Santoso yang diusulkan APINDO dan Junaedi yang diusulkan serikat pekerja. Sepuluh fraksi di Komisi III DPR RI seluruhnya hanya memilih dua nama tersebut.**

Dalam rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3), secara resmi memutuskan dua nama yang layak menjadi hakim *ad hoc* industrial dari empat calon yang diajukan Komisi Yudisial (KY). Masih ada enam lagi kursi hakim *ad hoc* industrial di MA yang dibutuhkan. Komisi III mendesak KY agar segera mengajukan kembali calon hakim *ad hoc* ini untuk diuji kelayakannya.

Sebelum mengambil keputusan, Desmond mengajukan pertanyaan ke setiap fraksi yang hadir dalam rapat pleno itu. Dan semuanya mengajukan dua nama yang sama. Rapat yang berlangsung singkat itu langsung menetapkan dua nama yang dinyatakan layak menjadi hakim *ad hoc* industrial di MA. Sebetulnya, Komisi III diminta memilih tiga dari empat calon, tapi tak bisa dipenuhi karena hanya dua itu yang layak.

“Kekurangan itu sebetulnya delapan orang. Tapi, KY mengirim ke Komisi

III empat orang. Setelah kita *proper*, kesimpulan kita tidak bisa memilih ganjil. Dengan berat hati kalau kita pilih dua dari APINDO dan satu dari serikat pekerja, maka serikat dirugikan. Karena unsurnya harus seimbang, maka delapan orang. Kepresnya kan mengamanatkan delapan orang. Mereka sepakat tidak bisa pilih tiga orang. Masih ada enam orang kosong yang harus dilengkapi,” jelas Desmond, usai memimpin rapat. ■

mh/sf

**Kekurangan itu sebetulnya delapan orang. Tapi, KY mengirim ke Komisi III empat orang. Setelah kita proper, kesimpulan kita tidak bisa memilih ganjil. Dengan berat hati kalau kita pilih dua dari APINDO dan satu dari serikat pekerja, maka serikat dirugikan. Karena unsurnya harus seimbang**



Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau Bendungan Pilohayanga di Gorontalo

Foto: Ayu/hr

## Komisi IV Apresiasi Rencana Gorontalo Perbaiki Bendungan dan Irigasi

**Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera memperbaiki Bendungan Pilohayanga dan Bendungan Dulamayo yang rusak. Bendungan itu rusak akibat banjir bandang yang menerjang beberapa wilayah Gorontalo beberapa waktu lalu.**

“Beberapa waktu yang lalu terjadi banjir di Gorontalo dan salah satunya merusak Bendungan Pilohayanga dan Bendungan Dulamayo. Akibat dari rusaknya kedua bendungan tersebut, mengganggu perairan atau saluran irigasi sawah dan kebun warga. Bahkan hingga menurunkan produksi jagung yang merupakan produksi utama Gorontalo,” ujar Roem Kono usai meninjau Bendungan Pilohayanga bersama Anggota Komisi IV DPR dan Gubernur Gorontalo di Gorontalo, Selasa (27/3).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan rencananya yang ingin melakukan perbaikan saluran irigasi dengan membangun sebuah bendungan baru,

yang merupakan gabungan dari dua bendungan yang rusak karena banjir. Dengan bendungan baru nanti, lanjut Rusli, akan dapat mengaliri ribuan hektar sawah dan kebun warga. Hingga akhirnya akan semakin optimal hasil sawah dan

**Akibat dari rusaknya kedua bendungan tersebut, mengganggu perairan atau saluran irigasi sawah dan kebun warga. Bahkan hingga menurunkan produksi jagung yang merupakan produksi utama Gorontalo**

perkebunan warga.

“Saya akan bebaskan 30 hektar lahan dan langsung membangun saluran irigasi yang bisa mengaliri sawah dan kebun masyarakat. Tadi sempat dikatakan petani, saat ini mereka tengah menanam kacang tanah. Jika tanaman kacang tersebut mendapat air yang cukup banyak dari perbaikan irigasi nanti, maka dikhawatirkan akan merusak tanaman kacang warga. Oleh karenanya, mereka meminta agar perbaikan irigasi yang akan mengairi sawahnya dapat ditunda hingga dua bulan ke depan, disaat mereka usai panen,” papar Rusli.

Atas rencana Gubernur Gorontalo tersebut, Roem Kono beserta tim Kunker Komisi IV DPR RI mengapresiasinya. Bahkan pada kesempatan itu, ia bersama Gubernur Gorontalo juga berjanji akan memberikan benih jagung dan padi secara gratis plus memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa *hand tractor* kepada petani. ■ ayu/sf



# DPR Minta Pemerintah Berpihak pada Penginderaan Jarak Jauh LAPAN

**Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui teknologi penginderaan jauh mempunyai peran strategis dalam menyukseskan berbagai program pemerintah, diantaranya *zero burning policy* hingga kebijakan satu peta (*one map policy*). Namun, peran strategis tersebut tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak ada keberpihakan pemerintah dari sisi kebijakan dan anggaran.**

satelit penginderaan jauh resolusi rendah, menengah hingga tinggi. Ketiga stasiun bumi tersebut berada di Parepare (Sulsel), Rumpin (Bogor), dan Jakarta.

Dengan adanya stasiun bumi penginderaan jauh di Parepare dan Rumpin, seluruh wilayah Indonesia dapat tercakup sesuai jangkauan dari antena bumi. Khusus untuk stasiun bumi Parepare mampu mencakup wilayah timur hingga barat Indonesia, namun tidak sampai wilayah Aceh. Sedangkan stasiun bumi di Rumpin dibangun untuk mencakup wilayah Aceh dan sekitarnya.

■ ann/sf

**Harus ada keberpihakan pemerintah terhadap teknologi penginderaan jarak jauh, sehingga mampu menopang perkembangan zaman, khususnya terkait informasi geospasial**

**H**al itu disampaikan Satya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Stasiun Bumi Penginderaan Jauh LAPAN Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa (27/3). Dalam kesempatan itu, Komisi VII DPR RI juga mengapresiasi kinerja LAPAN dalam memberikan informasi penting terkait pemanfaatan data penginderaan jauh.

“Disampaikan bahwa Indonesia setiap hari dilewati oleh satelit dari negara lain, termasuk Amerika Serikat. Jadi, kalau kita tidak memprioritaskan penginderaan jarak jauh, maka kita terpaksa harus membeli data dari negara lain. Itu satu hal yang harus kita hindari. Karenanya, kita mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana agar LAPAN punya fasilitas, sebab data penginderaan jarak jauh manfaatnya banyak sekali,” papar Satya.

Menurut politisi F-PG itu, harus ada keberpihakan pemerintah terhadap teknologi penginderaan jarak jauh, sehingga mampu menopang perkembangan zaman, khususnya terkait informasi geospasial. Nantinya, hanya akan ada satu referensi geospasial yang menjadi referensi dalam menerapkan suatu kebijakan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih informasi terkait lahan.

“Banyak hal yang bisa dilakukan dengan teknologi penginderaan jarak jauh ini, termasuk keinginan pemerintah untuk menganut kebijakan satu peta di seluruh sektor. Sehingga kita bisa menghindari adanya *overlapping* atau kesimpangsiuran ukuran yang tidak sama, bahkan membuat luasan Indonesia lebih luas dari ukuran peta sesungguhnya. Itu bisa dihindari kalau kita menerapkan *one map policy* dengan baik,” sambung Satya.

Satya menambahkan, selain menyediakan prakiraan cuaca, kegiatan keantariksaan juga membuka peluang baru pendidikan jarak jauh (*tele-education*) dan pelayanan kesehatan jarak

jauh (*tele-medicine*) dengan penggunaan satelit.

Tak hanya itu, tambah politisi dapil Jawa Timur itu, data satelit yang disediakan LAPAN sangat penting dalam membantu langkah-langkah penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta memantau titik panas kebakaran hutan (*hotspot*) sehingga dapat ditanggulangi secara dini. Bahkan, LAPAN dapat memberikan informasi potensi sumber perikanan di laut, yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Diketahui, saat ini Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (Pustekdata) LAPAN mengoperasikan tiga stasiun bumi untuk menerima berbagai jenis data atau citra penginderaan jauh satelit, dari data



Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Stasiun Bumi Penginderaan Jauh LAPAN Parepare Sulawesi Selatan

Foto: Anne/hr

# Negara Diminta Majukan Pendidikan Agama dan Pesantren



Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto didampingi Watua Dossy Iskandar menerima laporan usulan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren dari F-PPP dan F-PKB

Foto: radika/ri

**Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, pihaknya mendorong agar negara terlibat dalam memajukan pendidikan agama, tidak hanya Agama Islam, tapi juga agama-agama lainnya yang diakui Negara Indonesia.**

“Jadi hendaknya undang-undang ini gagasan pokoknya mendorong supaya pendidikan keagamaan, baik itu Islam dan agama lain maju dan menjadi landasan pembentukan karakter bangsa,” jelas Totok saat mendengarkan masukan dari dua pengusul RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Totok yang juga memimpin rapat ini menyampaikan, definisi pesantren dalam RUU ini hendaknya dibahas secara komprehensif dan melingkupi jenis pendidikan agama yang ada di Nusantara. “Beberapa catatan penting saya kira, mungkin perlu dielaborasi konsep pesantren ini. Pesantren tidak hanya dipandang pada nama saja, tapi definisinya perlu diperluas atau diperdalam,” ungkapnya.

Politisi Fraksi PAN ini menyampaikan,

Baleg akan segera membentuk Panja Harmonisasi dan melakukan pendalaman terhadap draf dari Fraksi PPP dan PKB ini. “Pada dasarnya, kalau ada salah-salah kita benarkan, kalau sudah betul kita dukung,” ujar Totok.

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati yang menjadi juru bicara di Baleg menyampaikan dalam beberapa hal terjadi kesamaan pemahaman diantara dua pengusul, baik PPP dan PKB yang diwakili oleh juru bicara Nihayatul Wafiroh.

Reni menjelaskan, sebab musabab kenapa RUU ini diusulkan untuk menjadi undang-undang, karena dalam sejarah pendidikan di Indonesia, jauh sebelum sistem pendidikan nasional hadir, yakni sekitar tahun 1347, telah terjadi proses pendidikan. Awalnya lembaga pendidikan di Nusantara menggabungkan kurikulum pendidikan agama dan umum.

Meskipun ada kesamaan prinsip, di setiap daerah penamaannya berbeda-beda. “Yang setiap daerah berbeda-beda, kalau di Jawa namanya pesantren, kalau di Aceh namanya menasah, kalau di Sumatera Barat namanya surau,” ungkap Reni.

Dari sisi historis, dia juga menjelaskan, seiring kedatangan Portugal dan Belanda terjadi pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Jadi menurutnya, jika merunut pada sejarah sesungguhnya dalam pesantren, menasah, dan surau itu terjadi pembelajaran yang komprehensif, bukan saja pendidikan agama tetapi juga pendidikan umum.

■ eko/sf

## Perpustakaan UNS Dukung Sosialisasi Digitalisasi Parleментарia

**Universitas Sebelas Maret (UNS) mendukung sosialisasi digitalisasi Majalah dan Buletin Parleментарia agar memudahkan distribusi majalah bagi mahasiswa/i UNS dan masyarakat umum.**

“Jika memungkinkan kita bisa bantu sosialisasi format digital majalah dan buletin melalui *website* UNS Library dengan memasukan link digitalnya,” ujar Kepala UPT Perpustakaan UNS Muhammad Rohmadi kepada tim kunjungan monitoring dan evaluasi Buletin dan Majalah Parleментарia 2018, di Kampus

UNS, Solo, Jawa Tengah, Senin (26/3).

Rohmadi mengharapkan agar Bagian Penerbitan Sekertariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menambah jumlah kiriman terbitan Majalah dan Buletin Parleментарia. “Kami juga menyarankan agar tata layout Majalah lebih eye catching, khususnya versi cetaknya. Untuk isi sudah bagus, hanya posisi

*layout* masih terasa ‘kering,” terangnya.

Untuk kiriman Majalah dan Buletin Parleментарia, lanjut Rohmadi, pihaknya mengharapkan 10 eksemplar dalam setiap edisinya, sehingga pihaknya dapat membaginya ke seluruh departemen yang ada di UNS. “*Packaging* atau kemasan cetakan sudah elegan *full color*. Tapi kami menyarankan 10 eksemplar

# BURT Serap Aspirasi Evaluasi Renstra DPR

**Upaya Rencana Strategis (Renstra) DPR RI untuk mewujudkan parlemen yang modern, berwibawa dan kredibel hampir melewati dua periode, yakni periode 2010-2014 dan periode 2015-2019. Karena itu, diperlukan evaluasi Renstra DPR RI periode 2015-2019 sebelum berganti ke periode selanjutnya.**



Tim Kunker BURT DPR RI bersama civitas academica Universitas Udayana

Foto: Ribka/7hr

**G**una mendapatkan masukan terkait evaluasi Renstra DPR RI itu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati menyerap aspirasi dari cendekiawan dan civitas academica Universitas Udayana (Unud), di Aula Gedung Pasca Sarjana Unud Bali, Jumat (23/3).

Dalam kesempatan itu, Anggota BURT DPR RI Rendy Lamadjido mengatakan, pihaknya melakukan semacam uji materi terhadap keinginan DPR untuk mewujudkan parlemen modern, karena DPR ini dimiliki oleh semua masyarakat.

“Kami mencoba untuk mendapat input

dari masyarakat terutama masyarakat cendekiawan atau civitas academica, dengan menggali keinginan mereka untuk menjadikan DPR ini milik semua rakyat, dan bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas nanti,” ungkap Rendy.

Dijelaskannya, rencana strategis untuk melahirkan suatu parlemen yang modern, berwibawa dan kredibel adalah aspirasi masyarakat, siap melakukan kontrol kepada pemerintah, dan siap melaksanakan sesuatu yang diamanahkan oleh Undang-Undang 1945 dan Pancasila “Bagaimana amanah untuk melaksanakan kehendak rakyat serta fungsi kontrol yang terpercaya

untuk buletin dan majalah,” tambahnya.

Dia menambahkan, secara prinsip Majalah dan Buletin Parlemen sangat bermanfaat bagi mahasiswa/i sebagai media komunikasi politik pusat dan daerah, selain televisi informasi dari TV Parlemen. “Ini lebih sebagai media informasi, sekaligus penelitian mahasiswa FISIP dan Bahasa, sehingga diharapkan dapat sinergis satu sama lain,” paparnya.

Tim *monitoring* dan evaluasi Majalah dan Buletin Parlemen ke Solo bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi Majalah dan Buletin Parlemen, dengan tujuan melihat sejauh mana kedua produk ini

juga fungsi legislasi yang melahirkan undang-undang tepat waktu yang menyerap aspirasi masyarakat,” jelasnya

Perwakilan civitas academica Unud DR. Piers Andreas Noak dan I Ketut Ardhana dan beberapa dosen lainnya dalam pertemuan ini memaparkan banyak hal sebagai catatan untuk penyusunan Renstra mendatang.

“Proses penyusunan Renstra lima tahun ke depan sedapat mungkin harus bisa melibatkan semua pemangku kepentingan. Paling tidak, sebelum kita buat Renstra kita sudah bisa mendapat masukan-masukan dengan berbagai kuesioner dan sebagainya untuk bisa dibuat sebagai pemikiran awal untuk kerangka lima tahun mendatang,” jelas Andreas.

Pentingnya hal ini, tambah Andreas, agar Renstra dapat lebih terperinci, dibuat melalui presidium meliputi tahapan perencanaan dan pelaksanaannya pada jangka waktu tertentu yang dikemas untuk periode mendatang, agar Renstra DPR RI berkesinambungan dari periode ke periode.

Sementara itu I Ketut Ardhana mengemukakan pentingnya fasilitas untuk memajukan keterbukaan informasi publik dan ruang mawadahi penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPR RI.

Hal ini pun disetujui oleh anggota BURT DPR RI Ribka Tjiptaning yang mengatakan bahwa memang sangat perlu diadakan sebuah ruang aspirasi untuk masyarakat umum dalam berunjuk rasa. “Sangat sepekat dengan adanya ruang aspirasi, sehingga demonstrasi menyampaikan pendapat ada tempatnya. Tapi wakil rakyat juga harus konsisten, harus mau menemui,” ujar Ribka.

Menurutnya, hal ini sekaligus sebagai evaluasi terhadap anggota dewan untuk selalu hadir saat diperlukan, baik pada rapat yang diselenggarakan maupun saat harus menemui masyarakat penyampai aspirasi atau pengunjuk rasa. ■ ran/sf



Kepala Bagian Penerbitan Setjen dan BK DPR RI Sunardi (kanan) dan Kepala UPT Perpustakaan UNS Muhammad Rohmadi di Universitas Sebelas Maret

Foto: dok/pr

sampai ke tangan masyarakat umum, lembaga masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi.

Ketua tim rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Penerbitan Setjen dan BK DPR RI Sunardi dengan 7 anggota tim monitoring majalah dan buletin, diantaranya Mediantoro, Sugeng Irianto, Sjaepudin, Subadri, Abdul Kodir, Fathurahman, dan Friedrich Munchen.

Rombongan memantau penyebaran majalah dan buletin ke berbagai titik diantaranya Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMY), dan PT NCS. ■ ran/sf



Foto: Huser/hr

Tim Kunker Banggar DPR meninjau kawasan ekonomi khusus di Lombok, NTB

## DPR Nilai KEK Mandalika Jaga Kearifan Lokal

**Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan pariwisata. Tradisi dan budaya setempat tetap dilestarikan begitu juga produksi kerajinan kain tenun dan lain-lainnya tetap hidup.**

**KEK ini akan dilengkapi dengan kawasan wisata syariah. Para wisatawan muslim, terutama dari Timur Tengah tak perlu khawatir dengan fasilitas kuliner halal, termasuk tempat ibadah.**

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan, percepatan pembangunan daerah menjadi keniscayaan ketika sebuah daerah ditetapkan sebagai KEK Pariwisata. Masyarakat bisa ikut memanfaatkannya dengan berdagang kerajinan dan makanan-minuman.

“KEK ini untuk percepatan ekonomi daerah. Masyarakat yang menjual makanan dan kerajinan lokal bisa ikut terekspose,”

papar Azis saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Banggar ke Lombok, NTB, Kamis (22/3).

Masyarakat NTB yang religius, sambung Azis, juga tidak terganggu dengan pembangunan KEK Pariwisata ini. Apalagi, KEK ini akan dilengkapi dengan kawasan wisata syariah. Para wisatawan muslim, terutama dari Timur Tengah tak perlu khawatir dengan fasilitas kuliner halal, termasuk tempat ibadah. Inovasi kawasan juga sangat baik dengan desain unik dan penuh sentuhan etnik.

*Masterplan* KEK Pariwisata Mandalika diharapkan Azis, bisa disetujui oleh Pemda dan pemerintah pusat. Banggar baru menganggarkan pembangunan KEK Mandalika untuk tahun anggaran 2015-2016 yang digunakan untuk pembangunan KEK 2017-2018. Sementara untuk 2018-2019 belum dialokasikan kembali.

“Anggaran 2018-2019 akan dilihat dulu alokasinya pada pembahasan bulan Juli nanti,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

■ mh/sf

# Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali



**Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara, barat, dan timur. Pemerataan pembangunan ini harus menjadi perhatian serius di Bali.**

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Eriko Sotarduga mengungkapkan hal ini saat mengikuti Kunjungan Kerja Banggar yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin ke Bali, Selasa (27/3). Diketahui, dana transfer daerah ke Bali juga kerap terlambat datangnya, sehingga ini menjadi persoalan saat Pemprov setempat ingin melakukan pemerataan pembangunan.

“Di Bali ini ada ketimpangan. Wilayah Bali selatan pendapatannya begitu besar, sehingga masyarakat dari Bali utara, barat, dan timur datangnya ke Bali selatan untuk mencari

penghidupan. Ini yang harus dibenahi dan dicari kiat-kiat apa yang tepat, agar pembangunan ini merata. Artinya, jangan hanya terpusat di Bali selatan saja. Bali barat, timur, dan utara hanya sebagai tujuan wisata, tapi wisatawan menginap, makan, dan lain-lainnya di Bali selatan. Ini yang harus dipikirkan,” kata Eriko.

Politisi F-PDI Perjuangan ini berharap, politik anggaran di Bali mungkin perlu dibenahi. Saat yang sama, pemerataan pembangunan di Bali juga jangan sampai menghilangkan kultur Bali sendiri yang dinilai sebagai keunggulan wisata. Pemrov Bali sendiri mengusulkan agar dana perimbangan dipusatkan di provinsi. Tapi, lanjut Eriko, itu harus disesuaikan

dengan prinsip otonomi daerah. Pada prinsipnya, otonomi daerah itu berada di tingkat dua, yaitu kabupaten dan kota.

“Bagaimanapun, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Kita harus cari pola yang tepat, karena pada dasarnya otonomi daerah berada di tingkat II. Provinsi hanya bersifat koordinatif,” tutur politisi dapil DKI Jakarta II ini.

Sementara itu, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengusulkan agar dana transfer daerah diserahkan kepada provinsi untuk pemerataan pembangunan, sekaligus menjaga kultur Bali sebagai keunggulan destinasi wisata.

■ sc/sf



Anggota Banggar DPR RI, Eriko Sotarduga (kiri)

foto: Suci/hr



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan

Foto: Jaka/ht

# DPR Nilai Penggunaan Dana Desa di Kampung Tempuran Berjalan Efektif

**Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menilai, penggunaan Dana Desa di Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berjalan efektif, dan manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat.**

“Alhamdulillah dari pemaparan Kepala Kampung Tempuran, penggunaan Dana Desa juga dilaksanakan secara efisien mengikuti kaidah-kaidah ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya optimis Kampung Tempuran bisa jadi contoh untuk daerah lain,” Marwan memimpin Tim Kunjungan Kerja

Komisi XI DPR ke Kampung Tempuran, Lampung Tengah, Kamis (22/3). Ditambahkan politisi F- Partai Demokrat itu, alokasi Dana Desa di Kampung Tempuran hampir 80 persen digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. “Menurut saya wajar, kebutuhan

masyarakat di Kampung Tempuran ini memang infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, jembatan, gorong-gorong dan sumber air bersih. Jika sudah terpenuhi, Dana Desa akan dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat agar penghasilan bisa meningkat,” imbuh Marwan.

Menurut Marwan, jumlah nominal Dana Desa yang diterima oleh Kampung Tempuran ini perlu ditingkatkan, karena pengelolaannya sudah cukup baik. Selain itu, menurut ketentuan UU, dana yang diberikan bisa mencapai 10 persen dihitung dari dana transfer daerah, berarti tiap desa bisa mendapat sekitar Rp 2 miliar.

Selain itu, tambah politisi dapil Lampung ini, penambahan Dana Desa juga perlu didukung SDM yang berkualitas, jangan sampai perangkat desa yang mengelolanya tersangkut hukum karena ketidaktahuan dalam pengelolaan Dana Desa.

“Kapasitas para pelaksana ditingkatkan desa itu merupakan tanggung jawab kita semua, baik itu dari kementerian, BPKP, gubernur dan bupati. Semua stakeholder tersebut harus ikut mendampingi, agar para perangkat desa yang mengelola dana itu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutupnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyoemarto mengatakan, kedatangan Komisi XI DPR RI beserta jajaran sebagai bentuk dukungan, agar seluruh pelaku pemerintahan di Lampung Tengah lebih giat lagi bekerja mengelola Dana Desa ini.

“Saya juga ada usulan, supaya Dana Desa ini ada penambahan dan kalau bisa jangan hanya desa saja yang dapat, tetapi kelurahan juga bisa mendapatkan, agar tidak timbul ketimpangan,” tutupnya. ■ jk/sf

“Dana Desanya mereka gunakan untuk membangun tempat wisata Umbul Ponggok yang tadi kita tinjau. Wisata itu dibangun karena desa ini memiliki potensi air yang berlimpah, dulu tidak dimanfaatkan sekarang didongkrak untuk peningkatan pendapatan desa. Nah di sana wisatawan bisa snorkling, diving dan berselfie di dalam air tawar, dengan biaya Rp30-40 ribu,” jelasnya di Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) Klaten, Jawa Tengah, Kamis (22/3).

Tidak hanya mengandalkan wisata, lanjut Fathan, Desa Ponggok juga menjadi pusat produksi ikan nila yang dibudidayakan serta produksi makanan

yang bersumber dari ikan hingga tulang nila yang didistribusikan ke pasar sekitar Klaten, dan juga untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kuliner.

“Kita lihat partisipasi masyarakat juga luar biasa sekali dalam membangun

Desa Ponggok menjadi desa mandiri, manajemennya sangat bagus,” tuturnya.

Politisi Fraksi PKB itu juga sangat mengapresiasi pendapatan desa yang mencapai Rp13 miliar per tahun. “Keuntungannya mencapai Rp3,5

# Sukses Kelola Dana Desa, Ponggok Jadi Percontohan

**Anggota Komisi XI DPR RI Fathan mengapresiasi keberhasilan Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polonharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang sukses dalam mengelola Dana Desa dengan memanfaatkan potensi alam.**



miliar, maka semua beban BPJS bidang kesehatan ditanggung pemerintah desa. Dan semua anak SMA ditanggung biaya kuliah S-1 oleh desa, dengan tujuan ada yang meneruskan pembangunan desa mandiri. Ini praktik yang harus kita contoh,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono, mengatakan Dana Desa sangat membantu dalam percepatan pembangunan desa. Dengan adanya Dana Desa hampir semua desa bisa maju dan mandiri dengan mengerakkan potensi yang dimiliki di daerah masing-masing.

Hal ini sejalan dengan komitmen Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

“Jika dulu Desa Ponggok termasuk dalam desa miskin dan tertinggal, kini tampil menjadi mandiri. Berkat sumber air yang berlimpah yang dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan desa,” kata Junaedi.

Untuk menyukseskan pembangunan desa, Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes Tirta Mandiri yang berfokus mengolah dan mengelola umbul atau sumber air alami itu menjadi obyek

wisata selam air dangkal (snorkeling).

“Selain berkat keberhasilan dalam mengelola wisata air, pendapatan sebesar itu juga berasal dari sejumlah sektor usaha yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri, seperti wisata kuliner,” jelasnya.

Sebagai desa mandiri yang baru mulai menggeliat sejak 2009, peningkatan pendapatan Ponggok dalam kurun tiga

tahun melesat hingga 50 kali lipat, yakni dari Rp 211 juta pada 2013 menjadi Rp10,3 miliar pada 2016.

“Mengelola pendapatan besar itu perlu punya mimpi yang panjang. Semakin banyak mimpi, semakin besar kebutuhan anggarannya. Kalau semua mimpi sudah terlaksana, nanti larinya ke investasi,” kata Junaedi. ■ rmm/sc



Anggota Komisi XI DPR RI Fathan memberikan cenderamata kepada mitra kerja di Jawa Tengah

Foto: Ria/hr

## 100 Persen Dana Desa Difokuskan untuk Kepentingan Rakyat

**Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menilai penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten cukup berhasil. Lebih penting dari itu, dia menegaskan 100 persen Dana Desa difokuskan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (22/3).**



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno

Foto: Eko/hr

“ Bahwa memang penyerapan Dana Desa ini untuk tahap pertama, kedua, dan lima tahun ke depan ini memang diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Anggaran operasional desa itu bisa memanfaatkan ADD (Alokasi Dana Desa), yang lebih bersifat operasional. Tapi kalau Dana Desa ini 100 persen untuk kepentingan masyarakat,” jelas Soepriyatno.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang

memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak sekali kegiatan-kegiatan di desa yang sudah berhasil dan hanya sedikit sekali yang belum mendapat klarifikasi,” ujar politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Soepriyatno juga mengungkapkan, banyak aturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang sudah sangat dipahami oleh kepala desa dan para perangkatnya. Dan hanya sebagian saja ada beberapa tindakan aparat desa yang membutuhkan klarifikasi dari aparat penegak hukum.

“Sedikit sekali lah ya, hal-hal yang menurut saya hanya memerlukan klarifikasi oleh pihak aparat penegak hukum, karena ada laporan-laporan yang tidak sesuai,” ungkap politisi dapil Jawa Timur itu. ■ eko/sf



Pimpinan Komisi XI DPR RI bersama calon Gubernur BI Perry Warjiyo, sebelum uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi XI

Foto: Jayaedi/hr

## Musyawarah Mufakat, Komisi XI Tetapkan Gubernur dan Deputi Gubernur BI

**Komisi XI DPR RI telah melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) dan tiga calon Deputi Gubernur BI. Secara musyawarah mufakat, Komisi XI DPR RI akhirnya menetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI dan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI.**

**D**emikian diungkapkan Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng usai melakukan rapat internal Komisi XI guna pengambilan keputusan, usai uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

“Komisi XI mulai hari ini dari pagi sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI, dan kemarin tiga orang untuk Deputi Gubernur BI. Kita sudah dengar penjelasan masing-masing calon gubernur dan deputi gubernur tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Kami putuskan musyawarah mufakat bulat 10 fraksi untuk Gubernur Bank Indonesia yakni Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur yakni Dody Budi Waluyo,” kata Melchias di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3).

Melchias melanjutkan, keputusan diambil seiring seluruh fraksi di DPR mengusulkan calon yang sama, sehingga tidak ada perbedaan pendapat diantara kesepuluh fraksi. Usai memperoleh keputusan ini, Komisi XI segera mengirim surat kepada Pimpinan DPR untuk dapat

dilanjutkan proses selanjutnya yakni dibacakan dalam Rapat Paripurna.

“Kami secara musyawarah mufakat, masing-masing fraksi menyampaikan calon yang sama. Hari ini kita langsung kirim surat ke Pimpinan DPR untuk dijadwalkan di Bamus dan Paripurna. Kalau bisa Selasa depan dapat dibacakan di Paripurna,” tutur Melchias.

Sejumlah harapan disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru ini. Politisi Partai Golkar ini menuturkan Gubernur BI harus mampu menjaga stabilitas dan inflasi keuangan di Indonesia. Hal-hal terkait terobosan guna menjaga nilai kurs rupiah di dunia tetap terjaga dengan baik juga menjadi harapan Melchias.

“Kita harapkan tupoksi mereka yakni menjaga stabilitas kurs dan inflasi. Kita juga minta terobosan yang *greget* supaya nilai kurs jadi lebih baik. Di sini kita ketahui, likuiditas dolar AS kurang, kita minta BI keluarkan kebijakan supaya orang yang meminjam duit di Indonesia, hasil ekspornya masuk di Indonesia

kembali dan ditukarkan mata uang lokal, supaya dolar kita tidak krisis likuiditas,” papar Melchias.

Hal lain juga diminta Melchias kepada Gubernur BI yakni saat menghadapi tahun politik, khususnya menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, BI diharapkan mampu menjaga ketersediaan uang. Hal ini penting karena pemilu akan membuat roda perputaran uang menjadi sangat besar.

“Kita harap ketersediaan uang jangan kurang, karena pilkada berurusan dengan perputaran uang. BI harus jaga stabilitas makro dan jangan hanya gunakan cara konvensional misal intervensi, harus ada terobosan lain agar likuiditas dolar juga semakin kuat,” tandasnya.

Setelah mendapatkan keputusan tingkat I ini, nantinya DPR akan segera melanjutkan pembahasan tingkat II melalui Sidang Paripurna, sebelum nantinya hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur dan Gubernur Bank Indonesia ini diserahkan kepada Presiden untuk dapat segera dilantik. ■ hs/sf



Foto: Arief/hr

Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat

## DPR Dukung Industri Pesawat Nasional

**Wilayah Geografis Negara Indonesia yang luas dengan ribuan pulau, perlu sebuah moda transportasi yang mumpuni untuk menjelajahnya, salah satunya adalah pesawat. Oleh karena itu, DPR RI terus mendukung industri pesawat nasional yang sangat diperlukan Indonesia, melalui PT Dirgantara Indonesia (PT DI).**

“Perkembangan PT Dirgantara Indonesia bisa membuat industri pesawat, karena kita tahu Indonesia sangat luas dan membutuhkan pesawat dalam negeri yang kuat. Saya yakin kalau di-support dengan SDM dan dana dari negara, ini bisa berkembang dengan baik,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso saat memimpin peninjauan ke hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/3).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini, pihaknya meminta masukan kepada Direksi PT DI, terkait dukungan yang bisa diberikan oleh

Komisi VI DPR RI.

“Tentunya kami punya tugas penganggaran. Artinya anggaran apa yang dibutuhkan mudah-mudahan akan menjadi perjuangan kami bersama selama untuk bangsa, kita akan berpihak kepada PT DI,” imbuh politisi dapil Jawa Tengah itu.

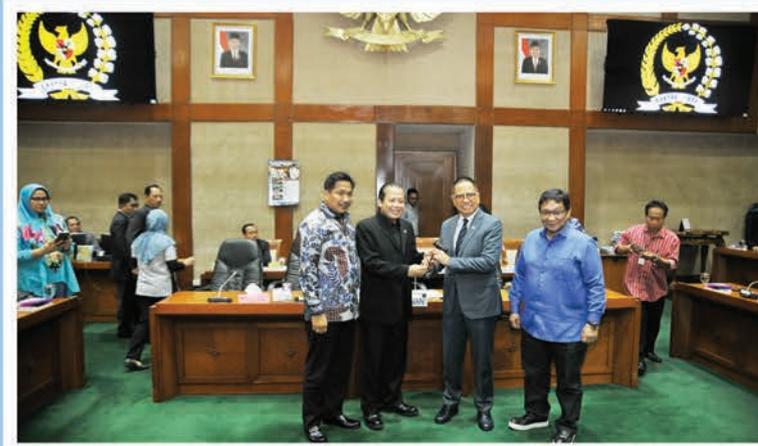
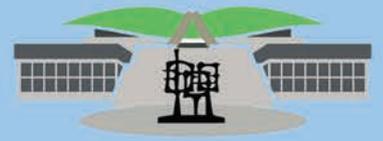
Di tempat yang sama, Direktur PT DI Elfien Goentoro berharap DPR dapat mendukung PT DI. Salah satunya melalui

dukungan pada pengembangan pesawat N219, karena pesawat ini merupakan produk buatan anak bangsa sendiri.

“Agar bisa tepat waktu untuk bisa menghasilkan secara komersial, kita punya target *prototype* untuk tahun ini. Memang ada kekurangan dana pengembangan yang ada di lapangan sedang ada proses, sudah kami sampaikan kepada DPR untuk bisa dibantu penyelesaiannya,” katanya usai pertemuan.

Dalam rangka pengembangan produksi untuk mencapai 50 pesawat per tahun, tahapannya sekitar tiga tahun. “Targetnya tahun depan 6 pesawat dengan *resisting facility*, terus berkembang menjadi 19, terus 39, langsung 49 atau 50. Jadi ini program yang telah kami buat, semoga berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Elfien. ■ afr/sf





Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan melantik Pimpinan Komisi VI DPR Dito Ganinduto (F-Golkar) dan Pimpinan Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily (F-Golkar), Rabu (28/3). FOTO: ENO,ARIEF/HR



Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI menerima perwakilan aliansi masyarakat Petambak Garam Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terkait kebijakan pemerintah mengenai impor garam, Senin (26/3). FOTO: JAKA/HR



Anggota Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menemui guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di depan Gedung DPR, Selasa (27/3). FOTO: RUNI/HR